



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 -2026**



**TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Renstra memuat Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih serta Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tanjung Balai Karimun, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**



Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II Gambaran Pelayanan SKPD	 11
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya	17
2.3 Kinerja Pelayanan	19
2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	22
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 25
 BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis	 28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	42
 BAB IV Tujuan dan Sasaran	 44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	44



BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	46
	5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	46
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	49
BAB VII	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	65
BAB VIII	Penutup	69



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	20
Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	21
Tabel 2.3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka	22
Tabel 2.4 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja	23
Tabel 2.5 : Capaian Indikator Kinerja Perindustrian	25
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan PD	29
Tabel 3.2 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	36
Tabel 3.3 : Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	41
Tabel 3.4 : Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	42
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	46
Tabel 5.1 : Strategi dan Arah Kebijakan	47
Tabel 6.1 : Rencana Program, Indikator Kinerja Disertai Pendanaan	49
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	66
Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	67
Lampiran : Pohon Kinerja dan Cascading	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2021 - 2026 dengan mengacu pada kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Karimun, serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Perumusan Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 secara pokok didasari pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun untuk tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Masa Bhakti 2021-2026, maka Visi dan Misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karimun.

Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap



Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rancangan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Renstra Dinas



Tenaga Kerja dan Perindustrian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang



- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
 35. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);
 36. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra) Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karimun.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk kurun waktu tahun 2021- 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja mengikuti ketentuan sistematika dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Kata Pengantar****Daftar Isi****Daftar Tabel****BAB I PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

- a. Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

- b. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

- c. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang



dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya,

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Mengemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertetangga/saling



mempengaruhi.

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD. Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi
Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Mengemukakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.
- 4.2. Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD yang merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD



dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Memuat indikator kinerja perangkat daerah. termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun, yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun adalah Aparatur Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang tenaga kerja yakni :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pembangunan dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang tenaga kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh Bupati.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Teknis dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;



- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja

Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis operasional penyiapan dan pembinaan teknis hubungan industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan serta pengupahan, dengan uraian tugas yakni :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional perencanaan pelaksanaan hubungan industri, syarat dan norma kerja;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan hubungan industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang terhadap pelaksanaan penyiapan dan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas lain di bidang Hubungan industrial yang ditugaskan oleh Kepala Bidang hubungan Industri, Syarat dan Norma kerja.

Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Seksi Syarat dan Norma Kerja.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja.



4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang penempatan dan perluasan kerja dalam negeri dan luar negeri, dengan uraian tugas yakni :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja dalam negeri;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja luar negeri;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja.
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang penempatan dan perluasan kerja yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri;
- b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan uraian tugas yakni :

- a. Penyusunan program kerja pada seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi pembinaan teknis pelatihan tenaga kerja;



- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi pembinaan teknis produktivitas tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di tugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Produktivitas Tenaga kerja.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Industri membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempersiapkan bahan dan merumus kebijakan teknis, operasional, bimbingan usaha, sarana produksi pengawasan dan pengembangan usaha di bidang industri, dengan uraian tugas yakni :

- a. Melakukan perencanaan teknis operasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha industri makanan, minuman, agro, hasil hutan, kerajinan, logam, mesin,elektronika dan aneka industri.
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan industri dan pengembangan usaha industri;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dibidang industri;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan pengembangan indutri.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang perindustrian yang ditugaskan oleh kepala dinas.



Bidang Industri terdiri dari :

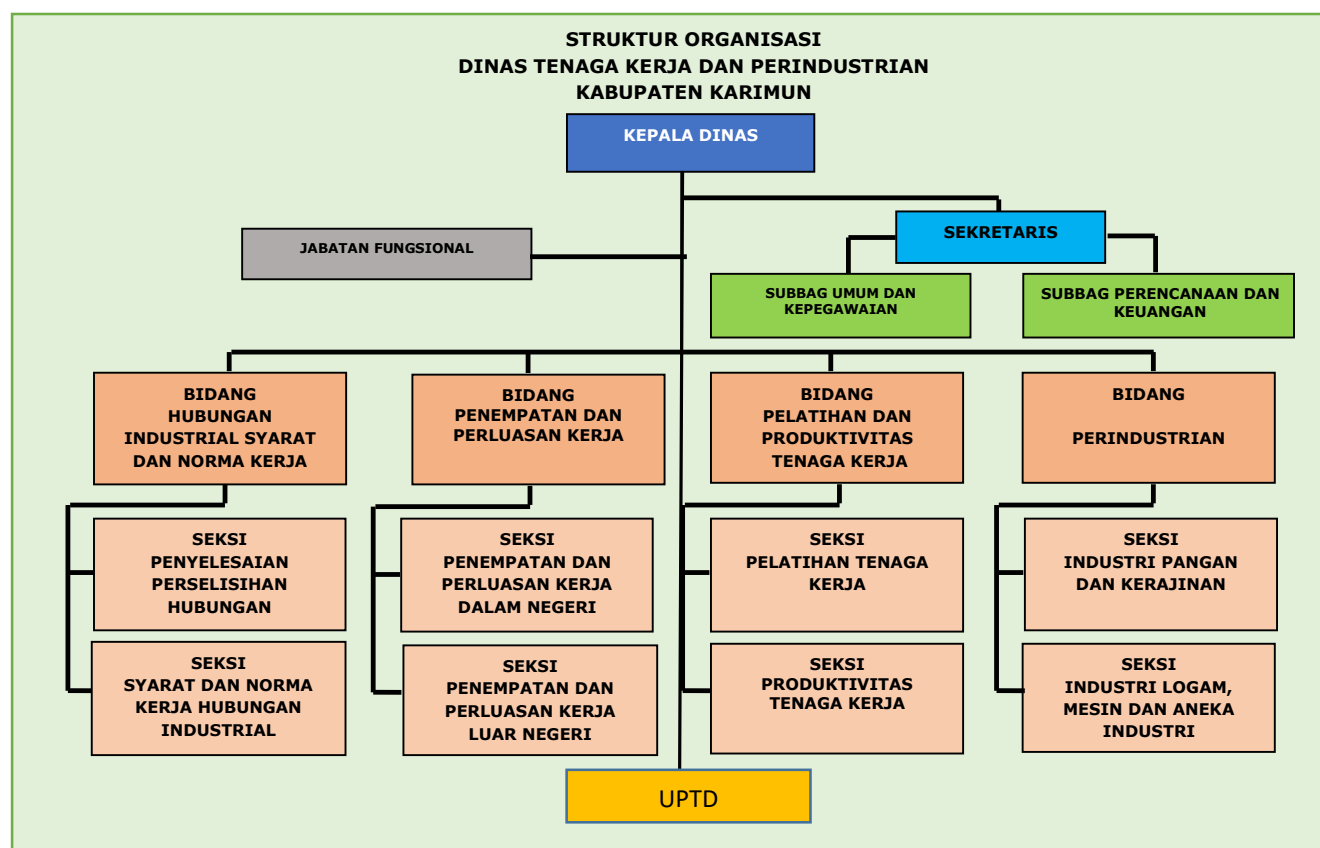
- a. Seksi Industri Pangan dan Kerajinan.
- b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka Industri.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - b. Seksi Syarat dan Norma Kerja.
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri.
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.
5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
6. Bidang Industri yang terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Pangan dan Kerajinan.
 - b. Seksi Industri Industri Logam, Mesin dan Aneka Industri.



2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sampai dengan awal tahun 2021 adalah 51 orang yang terdiri dari:

1	PNS	:	25 Orang
2	CPNS	:	1 Orang
3	Kontrak Pemda	:	18 Orang
4	Kontrak Dinas	:	8 Orang
	Jumlah	:	51 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel di bawah ini :

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gol.	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	5	-	-	-	5
III	16	-	-	-	16
IV	4	-	-	-	4
Tenaga Kontrak	-		18	8	26
TOTAL	25		18	8	51

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
Laki-Laki	9		18	5	24
Perempuan	16		8	3	27
TOTAL	25		26	8	51

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

1	Sekretariat	:	17 Orang
2	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	:	10 Orang
3	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	:	7 Orang
4	Bidang HI, Syarat dan Norma Kerja	:	8 Orang
5	Bidang Industri	:	9 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

1	Eselon II B	:	1 Orang
2	Eselon III A	:	1 Orang
3	Eselon III B	:	2 Orang
4	Eselon IV A	:	10 Orang
5	Eselon IV B	:	- Orang



6	Pejabat Fungsional	:	- Orang
	a) Arsiparis	:	- Orang
	b) Pengantar Kerja	:	- Orang
	c) Instruktur	:	- Orang
	d) Mediator	:	- Orang
7	Pelaksana	:	37 Orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (table c dan table d)

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
Strata-2 (S2)	5				5
Strata-1 (S1)	12		3	2	17
D4	-				0
Sarjana Muda/D3	1		3		3
D1, D2	-				-
SLTA/SMK	5		12	5	22
SLTP					0
SD					0
TOTAL	23		18	7	51

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :



Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realiasi					Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen			59,82	60,19	60,45	60,71	60,96	62,75	63,23	63,31	58,09	59,76	104	105,05	105	95,68	98,00
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Persen			3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	2,45	2,07	3,7	3,29	3,77	72,05	59,14	103	88,92	99,21
3	Tingkat Pertumbuhan Wirasusahabaru	Persen			2	4	8	11	13	1,87	3,24	6	7,30	25,36	93,5	81,25	75	66,36	195,07
4	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang berkompeten	Persen			13,77	14,3	14,8	15,4	15,9	12,75	21,5	16,1	16,92	0	92,59	150,4	108	110	0
5	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Persen			24	25	27	29	30	35	40	33	58,3	20	145	160	122	201	150
6	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen			33,5	34,3	34,7	35	35,4	34,2	35,4	29,1	41,38	86,70	102	103	83,7	118	244,91



Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja															
A. Belanja Tidak Langsung															
- Belanja Pegawai	2,935,558,000	2,894,106,452	2.783.257.796	3.656.240.980	3.188.694.976	2,698,971,284	2,548,510,739	2.262.006.638	3.200.144.749	3.055.659.724	91,94%	88,06%	81,27%	87,52%	95,82%
B. Belanja Langsung															
- Belanja Pegawai	4,851,342,000	6,577,110,546	2.783.257.796	3.656.240.980	1.070.134.000	4,764,629,896	6,109,169,027	2.262.006.638	3.200.144.749	979.320.000	98,77%	92,86%	81,27%	87,53%	91,51%
- Belanja Barang Jasa			1.118.380.000	2.958.346.800	2.013.404.500			1.082.785.000	2.888.972.432	1.687.094.365			96,82%	97,65%	83,79%
- Belanja Modal			14.500.000	34.077.600	48.241.300			14.500.000	34.077.600	48.241.300			100%	100%	100%

2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

➤ Ketenagakerjaan

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Masalah pengangguran juga terkait dengan kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, disamping permasalahan kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan perlu terus didukung. Jumlah angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan/peluang kerja dan pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan juga berdampak pada tingkat pengangguran. Disamping itu, masih diperlukan pembinaan yang baik kepada para perusahaan agar pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dapat dikurangi. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan peluang untuk berwiraswasta/menciptakan lapangan kerja merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan bidang ketenagakerjaan kedepan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi dan BPS Nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun selama 5 tahun lebih rendah dari TPAK Provinsi dan TPAK Nasional. Rendahnya TPAK ini dikarenakan tingginya angka penduduk usia 15 tahun ke atas yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah, mengurus rumah tangga maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi, seperti kaum lansia. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karimun cukup fluaktif dari tahun 2016 sebesar 2,52 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 5,70 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 2,91 persen, tahun 2019 naik menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 naik menjadi 8,36 persen.

Tabel 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional 2015 – 2020

No	Komponen	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TPAK Kabupaten Karimun	59,24	-	63,23	63,31	58,09	59,76
2	TPAK Provinsi Kepri	65,07	65,93	66,41	64,72	64,76	66,28
3	TPAK Nasional	65,76	66,34	66,67	67,31	67,53	67,77
4	TPT Kabupaten Karimun	5,69	-	5,70	2,91	5,46	8,36
5	TPT Provinsi Kepri	6,20	7,69	7,16	7,12	6,91	10,34
6	TPT Nasional	6,18	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07

Sumber: BPS Kepulauan Riau Tahun 2021

Sedangkan untuk permasalahan perburuhan yang terjadi selama 5 tahun antara pengusaha dan pekerja sangat berfluktuatif pada tahun 2016 terdapat 24 sengketa dan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 11, tahun 2017 sebanyak 20 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 17 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi 18 dan 7 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 11 dan 5 kasus.

Tabel 2.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2015 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk 15 Th + (jiwa)	155,137	155,804	147,456	163,003	165,892	175,826
2	Angkatan Kerja	91,902	91,902	100,824	103,200	96,359	105,081
3	Bukan Angkatan Kerja	63,235	63,902	46,632	59,803	69,533	70,745
5	Tingkat Kesempatan Kerja	55,87	55,63	64,48	61,76	58,09	91,63
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	2,52	6,04	6,03	6,03	8,36
7	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun	17	24	20	17	18	7
8	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	6	11	10	5	11	5
9	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	866	2236	274	293	529	1545

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	9,498	11,682	12,876	12,637	NA	17,434
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	NA	146	137	93	11	0
12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	NA	NA	10	20	0	20

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

➤ Perindustrian.

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kegiatan industri di Kabupaten Karimun yang potensial dikembangkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam KPBPB dan di luar KPBPB. Adapun pilar pembangunan industri di dalam KPBPB yaitu kawasan industri campuran, kawasan industri strategis kabupaten padat karya dan berorientasi export (manufaktur), serta kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan storage. Pembangunan kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Karimun antara lain kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup.

Sedangkan kegiatan industri di luar KPBPB diarahkan pada usaha industri mikro, kecil dan menengah yang terkait dengan potensi wilayah, juga industri rumah tangga seperti pengolahan makanan dan barang-barang kerajinan. Industri ini mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Karimun agar produk yang dihasilkan memiliki nilai lebih dan mampu bersaing dengan produk serupa yang berasal dari daerah lain.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan. Persentase kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan dan bantuan sarana prasarana produksi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebanyak 66 persen baik dalam skala sentra ataupun Kelompok Usaha Bersama (KUB). Akan tetapi pada tahun 2020 cakupan pembinaan hanya mencapai 48,15 persen. Sama dengan sektor perdagangan, sektor industri juga memiliki peran yang cukup penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun. Kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun cukup baik, termasuk kedalam lima industri penopang ekonomi Kabupaten Karimun, meskipun sejak tahun 2016, kontribusi industri dalam PDRB semakin mengecil. Pada tahun 2016 kontribusi sektor industri pengolah sebesar 14,32 persen, maka dalam lima tahun terakhir atau pada tahun 2020 kontribusinya menurun hingga 12,71 persen. Secara umum sektor industri masih menghadapi beberapa masalah diantaranya: status IKM yang berijin masih terbatas. perkembangan industri kecil yang belum maksimal. kualitas industri yang belum sesuai standar. dan masalah Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
----	-----------	------	------	------	------	------



1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	14,32	14,18	13,54	13,14	12,71
2.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	6,70	5,21	1,20	2,48	-5,00
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	NA	66 %	66 %	66 %	48.15 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya kebijakandan program prioritas Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 3) Adanya mekanisme kerja/SOP layanan ketenagakerjaan dan perindustrian yang terstandarisasi.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia yang melaksanakan beberapa fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 6) Tersedianya anggaran sebagai penunjang kegiatan.

KELEMAHAN (W):

- 1) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian,
- 2) Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja

- 3) Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 4) Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal serta mudah diakses oleh masyarakat/pencari kerja.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Letak Kabupaten Karimun yang strategis berdekatan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia.
- 2) Besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karimun
- 3) Adanya pelabuhan Embarkasi TKI.
- 4) Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan dan perindustrian jangka waktu 5 tahun kedepan.

ANCAMAN (T):

- 1) Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun.
- 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karimun.
- 3) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Karimun yang sesuai dengan standar perusahaan/industri.
- 4) Masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi.
- 5) Sangat bersinggungan dengan persoalan hukum dalam penanganan kasus perselisihan HI.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- 1) Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan
- 2) Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
- 3) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
- 4) Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan



2. Strategi W-O

- 1) Pembinaan lembaga pelatihan swasta
- 2) Membuat jaringan/ sistem informasi ketenagakerjaan dan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 4) Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat

3. Strategi S-T

- 1) Menurunkan jumlah fakir miskin
- 2) Menurunkan jumlah pengangguran terbuka
- 3) Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- 4) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
- 5) Peningkatan keselamatan pencari kerja.
- 6) Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis
- 7) Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- 8) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja
- 9) Pembinaan organisasi pekerja

4. Strategi W-T

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan dan Perindustrian
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja
- 4) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Karimun, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan di Kabupaten Karimun yang perlu ditangani pada periode tahun 2021-2026 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan terkait Sekretariat**1) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun namun menjadi tantangan bagi seluruh daerah di penjuru Indonesia. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan

dicapai.

2) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik

Berbagai kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh Pelayanan sesuai dengan haknya merupakan tugas bagi instansi pemerintahan untuk menyediakan kepentingan publik (masyarakat). Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik harus diupayakan mudah untuk diakses. Sebagai wilayah kepulauan, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Karimun khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Perlu inovasi dan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengatasi permasalahan akses. Selain jarak dan waktu, kinerja dari aparat pemerintah, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, lokasi, dan fasilitas juga menentukan kualitas pelayanan publik yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Beberapa pemberitaan media massa masih memuat kurangnya pelayanan publik di Kabupaten Karimun, seperti terlambatnya petugas dan penyelesaian urusan.

3.1.2 Permasalahan terkait Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pelatihan dan Produktivitas serta Bidang Penempatan Tenaga Kerja yakni :

1) Upah minimum yang dibawah Upah Minimum Kabupaten.

Banyak perusahaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

2) Masih banyak perusahaan yang tidak membuat perjanjian kerja.

3) Jaminan sosial tenaga kerja tidak dijalankan secara menyeluruh dan serius. Komitmen perusahaan untuk melindungi para tenaga kerja wanita belum direalisasikan.

4) Belum terpenuhinya sumber daya pegawai pada bidang-bidang usaha yang spesifik.

5) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan

husus pada bidang-bidang usaha.

- 6) Kurangnya minat dalam mengupayakan aktivitas yang berdasar pada sumberdaya alam, seperti bertani, berladang, melaut, budidaya.
- 7) Tingginya rasio ketergantungan. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan Kabupaten Karimun merupakan rasio tertinggi dalam kurun waktu empat tahun, sehingga beban yang harus ditanggung oleh usia produktif semakin besar.

3.1.3 Permasalahan terkait bidang Industri Yakni :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian
Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia
Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.
- 3) Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan-perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya.
- 4) Ketersediaan daya listrik untuk industri

Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

Tabel 3.1 Peta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial	Banyak perusahaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sehingga Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.	1. Upah yang belum sesuai UMK 2. PHK Sepihak
2	Belum terpenuhinya sumber daya pegawai pada bidang-bidang usaha yang spesifik.	Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha.	Kualitas tenaga kerja relatif masih rendah.
3.	Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian	Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.	Permodalan yang belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3.1 Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2025 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Karimun. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Karimun dapat di jelaskan sebagai berikut:

Pusat pertumbuhan ekonomi memiliki arti: (1) bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan

produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

Berkeadilan memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

Berlandaskan iman dan taqwa memiliki arti: bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.

3.3.2 Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun 2021- 2026.

(1) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi)

“Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri” memiliki makna: kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa depan diarahkan menjadi daerah yang mandiri dalam bidang perekonomian baik dibidang industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada, sehingga menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat.

“Berbasis sumber daya dan kearifan lokal” memiliki makna: aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata, serta mengembangkan dan menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur perdagangan dunia

(2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (berkeadilan dalam infrastruktur)

“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan” memiliki makna: karakteristik wilayahnya terdiri dari pulau-pulau tentu membutuhkan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas wilayah/pulau menjadi lebih mudah dijangkau sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas kawasan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antarpulau dan antarwilayah yang sesuai dengan kebutuhannya akan terus dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis.

“Pertumbuhan ekonomi wilayah” memiliki makna: pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan mengintegrasikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi.



(3) Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)

Sumber daya manusia yang “kuat” memiliki makna : adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

“kompetitif” memiliki makna : dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.

“berbudaya” memiliki makna : adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda- benda budaya. Budaya setempat yang dimaksud adalah Budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan *pluralisme* dan *heterogenitas* masyarakat Kabupaten Karimun.

(4) Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup)

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan selalu diselaraskan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi- fungsi dari lingkungan hidup dan memastikan bahwa semua jenis

aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

(5) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)

“birokrasi yang profesional” memiliki makna : 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap *mindset* dan *culturset* birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa. **“birokrasi yang unggul”** memiliki makna: adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan *skill* (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat berkontribusi

terhadap misi ke-tiga dan ke-lima Kabupaten Karimun yaitu:

- 1. Misi Ke Tiga : Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)**
- 2. Misi Kelima : Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)**

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam mewujudkan pencapaian misi tersebut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Visi : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.			



	Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)	Belum optimalnya perkembangan industri kecil dan Menengah juga masih rendahnya kondisi industri yang memiliki standar produksi layak	Terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor Industri Kecil dan Menengah	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor Industri Kecil dan Menengah
		Belum optimalnya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam penyelesaian masalah ketenakerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 8,36% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 59,76%.	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karimun	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor ketenakerjaan.
		Belum optimalnya pelayanan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2020 menunjukkan bahwa besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tidak terlaksana karena pandemi covid 19.		

	Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas	Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Karimun yang sesuai dengan standar perusahaan/industry	Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor ketenagakerjaan.
	Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan	Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja	Lapangan Pekerjaan yang tidak tersedia	Adanya beberapa perusahaan yang akan berinvestasi diantaranya PT. SOMA baru akan beroperasi pada tahun 2022.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahteran, Adil dan Berkesinambungan”.

Adapun arah kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas.
2. Penempatan dan Pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.

3. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan.
4. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan pelayanan internal.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industry
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industry
3. Kebijakan pemberdayaan industry
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industry
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
6. Kebijakan reformasi birokrasi.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri

1. Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja
2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja
3. Mengembangkan pelatihan berdasarkan pada kebutuhan sektor, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan status pekerjaan. (Membangun link and match antara program pendidikan dan program pelatihan dengan dunia kerja)
4. Memperluas skala pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui mengembangkan Balai Latihan Kerja atau kerjasama pelatihan dengan LPK yang mendukung Revolusi industri 4.0
5. Meningkatkan pola pelayanan untuk memperoleh informasi pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan penempatan tenaga kerja bagi calon tenaga kerja (angkatan kerja).
6. Peningkatan peran daerah dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan pekerja.
7. Perluasan Kesempatan Kerja yang berorientasi pada Usaha Mandiri.
8. Perluasan Kesempatan Kerja dengan meningkatkan penciptaan wirausaha baru, meliputi Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik dalam program pendampingan wirausaha, Tenaga Kerja Mandiri, Pendampingan Wirausaha Baru, terapan Teknologi Tepat Guna.
9. Padat Karya Produktif.

10. Penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna melalui pelaksanaan padat karya infrastruktur, pelaksanaan padat karya ekonomi produktif.
 11. Penempatan Tenaga Kerja Khusus, seperti untuk penyandang cacat, dll.
 12. Menggandeng perusahaan dan Diknas dalam rangka menggiatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan bagi lulusan baru SMA atau PT, untuk menerima mereka sebagai tenaga kerja magang.
 13. Peningkatan kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan perselisihan antara pekerja dan Pengusaha baik dari kuantitas maupun kualitas (Mediator)
 14. Mengoptimalkan Perselisihan Hubungan Industrial diselesaikan melalui perjanjian bersama.
 15. Mengoptimalkan pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja
 16. Mengoptimalkan Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan bagi buruh/pekerja.
- D. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri.
- Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri
1. Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
 2. Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat.
 3. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter.
 4. Tatakelola Pemerintahan Yang bersih.
 5. Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat.
 6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau.
 7. Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Pertambangan dan Lingkungan



Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1		Ketenagakerjaan		
	Memperluas Kesempatan Kerja dan peluang usaha	Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal serta mudah diakses oleh masyarakat/ pencari kerja.	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karimun	Letak Kabupaten Karimun yang strategis yang bersebelahan dengan negara singapura dan Malaysia
	Arah Kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan keterampilan Angkatan kerja	Belum adanya kepastian untuk mendirikan workshop/BLK	Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerja an	Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
2		Perindustrian		
	Meningkatkan ketahanan ekonomi	Belum optimalnya perkembangan industri kecil dan Menengah	Minimnya permodalan untuk usaha IKM	Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki sumber daya alam
	Arah Kebijakan : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.	Masih rendahnya kondisi IKM yang memiliki standar produksi layak	Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerja an	Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja dan perindustrian. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karimun. Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.

Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	Tidak terkait		
	Program Indikatif			
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis	Tidak terkait		
	Skenario dan Rekomendasi			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan revaluasi kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah, maka ada beberapa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 diantaranya adalah:

1. Sekretariat

- a. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan.
- b. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi.

2. Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

- a. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dengan perusahaan.
- b. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan para tenaga kerja pada jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Masih Tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- d. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- e. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan.
- g. Masih tingginya angka pengangguran disebabkan Jumlah Angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan/pekerjaan dan pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan sehingga berdampak pada tingkat pengangguran.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dan peluang untuk berwirausaha/menciptakan lapangan kerja.



3. Bidang Industri

- a. Rendahnya status IKM yang berijin, antara lain IKM memiliki Izin usaha industri kecil melalui P-IRT.
- b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil.
- c. Rendahnya kondisi industri yang memiliki standar produksi layak.
- d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Karimun maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berkontribusi dalam Pencapaian visi dan misi Ke-Tiga dan Ke-Lima dalam RPJMD Kabupaten Karimun yaitu :

Misi Ke-Tiga : *Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia).*

Misi Ke-Lima : *Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)*

Untuk Mencapai itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian **sasaran** yang ada dalam **RPJMD** yang merupakan **Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun**.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun . secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetiti dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).		
No	Tujuan	Indikator Tujuan
A.	Ketenagakerjaan	
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja didaerah	Tingkat Pengangguran Terbuka
B.	Perindustrian	



2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita
----	------------------------------------	----------------

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)		
No	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik

b. Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
A.	Ketenagakerjaan	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2) Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja
B.	Perindustrian	
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun beserta indikator kinerjanya disajikan



dalam tabel 4.1 berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Perindustrian											
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		PDRB Perkapita	Jt (RP)	56,78	59,68	62,74	65,94	69,32	72,86	76,59	76,59
		Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,65	0,65	0,66	,066	,066	0,67	0,67	0,67
B	Ketenagakerjaan											
2.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,36	8,20	8	7,60	7,10	6,60	6	6
		Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	59,76	60,17	61,21	62,45	63,71	64,17	65,27	65,27
			Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	91,37	91,37	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65	91,65
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
		Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnkarin	Nilai Akip	Nilai	72,16	72,72	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”				
Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia).				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
PERINDUSTRIAN				
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah	Pelaksanaan Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendataan, Pembinaan Dan Pelatihan
KETENAGAKERJAAN				
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Pelayanan bagi pencari kerja 2. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Serta Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, serta meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan
Misi 5 : Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Meningkatkan Sistem Pelayanan Yang Lebih Baik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Terhadap Program Strategis RPJMD Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)	
											2022		2023		2024		2025		2026			
									2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah								Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	8,36%	8,20%	8%	12.700.000.000	7,60%	13.360.500.000	7,10%	13.430.907.000	6,60%	13.460.000.000	6%	13.425.000.000	6%	66.376.407.000
	Meningkatn ya pertumbuha n tenaga kerja lokal yang kompetitif							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,76%	60,17%	61,21%		62,45%		63,71%		64,17%		65,27%		65,27%	
								Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	91,37%	91,37%	91,45%	7.077.100.000	91,50%	7.229.550.000	91,55%	7.026.202.000	91,60%	7.100.190.000	91,65%	6.577.045.000	91,70%	35.010.087.000
		2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	91,63%	92,25%	93,31%	300.000.000	94,55%	-	95,41%	-	96,33%	-	97,56%	235.000.000	97,56%	535.000.000
		2	7	2	#	#	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun yang disusun	0	0	2 Dokumen	300.000.000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	235.000.000	4 Dokumen	535.000.000
		2	7	2	2	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	275.000.000
		2	7	2	2	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	0	20 Perusahaan	150.000.000	0	-	0	-	0	-	20 Perusahaan	110.000.000	40 Perusahaan	260.000.000
		2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	55,79 %	55,79%	56,45%	5.097.100.000	56,45%	5.669.550.000	57,23%	5.231.202.000	57,23%	5.455.190.000	58,00%	4.672.045.000	58,00%	26.125.087.000
		2	7	3	#	#	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatka n pelatihan berbasis kompetensi	Na (Pande mi Covid 19)	3,60%	30%	4.762.100.000	30%	5.404.550.000	30%	4.951.202.000	30%	5.175.190.000	30%	4.387.045.000	30%	24.680.087.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	3	2 0 1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Na (Pande mi Covid 19)	439 Orang	550 Orang	4.562.100.000	620 Orang	5.219.550.000	560 Orang	4.766.202.000	570 Orang	5.000.190.000	510 Orang	4.182.045.000	2810 Orang	23.730.087.000
2	7	3	2 0 1	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0	0	4 Lemba ga	100.000.000	4 Lemba ga	85.000.000	0	-	0	-	0	-	8 Lemba ga	185.000.000
2	7	3	2 0 1	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	4 Unit	185.000.000	2 Unit	175.000.000	5 Unit	205.000.000	21 Unit	765.000.000
2	7	3	# #		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	0	0	1 LPK	135.000.000	1 LPK	130.000.000	1 LPK	135.000.000	1 LPK	135.000.000	2 LPK	135.000.000	2 LPK	670.000.000
2	7	3	2 0 2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0	0	1 LPK	135.000.000	1 LPK	130.000.000	1 LPK	135.000.000	1 LPK	135.000.000	2 LPK	135.000.000	2 LPK	670.000.000
2	7	3	# #		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas perusahaan kecil	Na	Na	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	75.000.000	1 Lapora n	80.000.000	1 Lapora n	80.000.000	1 Lapora n	80.000.000	5 Lapora n	415.000.000
2	7	3	2 0 4	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0	0	10 Perusah aan	100.000.000	10 Perusah aan	75.000.000	10 Perusah aan	80.000.000	10 Perusah aan	80.000.000	10 Perusah aan	80.000.000	50 Perusah aan	415.000.000
2	7	3	# #		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0	0	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	65.000.000	1 Dokum en	65.000.000	1 Dokum en	70.000.000	5 Dokum en	360.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	3	2 0 5	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0	0	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	65.000.000	1 Dokum en	65.000.000	1 Dokum en	70.000.000	5 Dokum en	360.000.000
		2	0 7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	44,66%	44,66%	45,15%	780.000.000	46,50%	830.000.000	46,75%	925.000.000	47,25%	850.000.000	47,25%	730.000.000	47,25%	3.190.000.000
								Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	1,6 m	2 m	2 m	100.000.000	2,1 m	110.000.000	2,1 m	110.000.000	2,2 m	110.000.000	2,2 m	110.000.000	10,6 m	540.000.000
		2	0 7	0 4	2 0 1		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	0	0	1 Dokum en	450.000.000	1 Dokum en	470.000.000	1 Dokum en	565.000.000	1 Dokum en	490.000.000	1 Dokum en	370.000.000	5 Dokum en	2.345.000.000
		2	0 7	0 4	2 0 1	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	0	0	2 Orang	75.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	75.000.000	2 Orang	25.000.000	2 Orang	25.000.000	10 Orang	250.000.000
		2	0 7	0 4	2 0 1	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0	0	250 Orang	75.000.000	250 Orang	100.000.000	250 Orang	100.000.000	250 Orang	75.000.000	250 Orang	25.000.000	1250 Orang	375.000.000
		2	0 7	0 4	2 0 1	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	0	20 Orang	85.000.000	20 Orang	95.000.000	20 Orang	105.000.000	20 Orang	105.000.000	20 Orang	110.000.000	100 Orang	500.000.000
		2	0 7	0 4	2 0 1	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0	0	2 Orang	65.000.000	2 Orang	75.000.000	2 Orang	80.000.000	2 Orang	80.000.000	0	-	8 Orang	300.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	0	0	2	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0	0	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	205.000.000	20 Orang	205.000.000	20 Orang	210.000.000	100 Orang	920.000.000
2	7	4	#	#	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	7 Perusahaan	9 Perusahaan	5 Perusahaan	330.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	35 Perusahaan	1.770.000.000
2	7	4	2	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	590.000.000
2	7	4	2	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0	0	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	5 Laporan	590.000.000
2	0	0	2	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0	0	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	5 Laporan	590.000.000
2	7	4	#	#	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	111 Orang	111 Orang	111 Orang	100.000.000	111 Orang	110.000.000	111 Orang	110.000.000	111 Orang	110.000.000	111 Orang	110.000.000	555 Orang	540.000.000
2	7	4	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	0	0	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	5 Laporan	540.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	800.000.000	5 Kasus	620.000.000	6 Kasus	760.000.000	6 Kasus	685.000.000	6 Kasus	830.000.000	28 Kasus	3.695.000.000
		2	7	5	#	#	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	18 Perusahaan	20 Perusahaan	22 Perusahaan	120.000.000	24 Perusahaan	100.000.000	26 Perusahaan	110.000.000	28 Perusahaan	120.000.000	30 Perusahaan	120.000.000	30 Perusahaan	570.000.000
								Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	140.000.000	4 Perusahaan	135.000.000	4 Perusahaan	140.000.000	4 Perusahaan	145.000.000	4 Perusahaan	145.000.000	4 Perusahaan	705.000.000
			7	5	2	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	31 Perusahaan	31 Perusahaan	31 Perusahaan	60.000.000	31 Perusahaan	50.000.000	33 Perusahaan	55.000.000	35 Perusahaan	60.000.000	38 Perusahaan	60.000.000	38 Perusahaan	285.000.000
			7	5	2	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	60.000.000	4 Perusahaan	50.000.000	4 Perusahaan	55.000.000	4 Perusahaan	60.000.000	4 Perusahaan	60.000.000	4 Perusahaan	285.000.000
		2	7	5	2	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	145.000.000	1 Laporan	145.000.000	5 Laporan	705.000.000
		2	7	5	#	#	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	540.000.000	3 Laporan	385.000.000	4 Laporan	510.000.000	3 Laporan	420.000.000	4 Laporan	565.000.000	5 Laporan	2.420.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

	2	7	5	2 , 0 2	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	85.000.000	7 Perkara	65.000.000	7 Perkara	90.000.000	7 Perkara	100.000.000	7 Perkara	110.000.000	35 Perkara	450.000.000
	2	7	5	2 , 0 2	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	100.000.000	7 Perkara	65.000.000	7 Perkara	90.000.000	7 Perkara	100.000.000	7 Perkara	100.000.000	35 Perkara	455.000.000
	2	7	5	2 , 0 2	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0	2 Asosiasi / 8 SP- SB	2 Asosiasi / 8 SP- SB	100.000.000	2 Asosiasi / 8 SP- SB	65.000.000	2 Asosiasi / 8 SP- SB	90.000.000	2 Asosiasi / 8 SP- SB	90.000.000	2 Asosiasi / 8 SP- SB	100.000.000	2 Asosiasi / 8 SP- SB	445.000.000
	2	7	5	2 , 0 2	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lemba ga	1 Lemba ga	1 Lemba ga	135.000.000	1 Lemba ga	130.000.000	1 Lemba ga	130.000.000	1 Lemba ga	130.000.000	1 Lemba ga	135.000.000	1 Lemba ga	660.000.000
	2	7	5	2 , 0 2	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	0	50 Orang	120.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	110.000.000	0		150 Orang	120.000.000	300 Orang	410.000.000
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat							PDRB Perkapita	56,78 Juta (Rp)	59,68 Juta (Rp)	62,74 Juta (Rp)		65,94 Juta (Rp)		69,32 Juta (Rp)		72,86 Juta (Rp)		76,59 Juta (Rp)		76,59 Juta (Rp)	
Meningkatn ya Kewirausah aan Masyarakat							Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,65%	0,65%	0,66%	1.100.000.00 0	0,66%	1.640.000.00 0	0,66%	1.875.000.00 0	0,67%	1.760.000.00 0	0,68%	1.915.000.00 0	0,68%	8.290.000.00 0



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	3	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	48,15%	59,65%	69,65%	550.000.000	77,15%	1.270.000.000	82,15%	1.495.000.000	85,40%	1.370.000.000	88,90%	1.525.000.000	88,90%	6.210.000.000
		3	3	2	#	#	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	0	2 Dokumen	6 Dokumen	550.000.000	6 Dokumen	1.270.000.000	6 Dokumen	1.495.000.000	6 Dokumen	1.370.000.000	6 Dokumen	1.525.000.000	30 Dokumen	6.210.000.000
		3	3	2	2	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	370.000.000
		3	3	2	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,0	1 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	255.000.000
		3	3	2	2	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,0	1 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	255.000.000
		3	3	2	2	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,0	1 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	255.000.000
		3	3	2	2	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.205.000.000	1 Dokumen	975.000.000	1 Dokumen	1.215.000.000	1 Dokumen	1.075.000.000	1 Dokumen	1.230.000.000	5 Dokumen	5.700.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	3 1	2	2 0 1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1 Dokum en	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	70.000.000	1 Dokum en	70.000.000	1 Dokum en	70.000.000	1 Dokum en	70.000.000	5 Dokum en	380.000.000
		3	3 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	12%	16,6%	26,6%	200.000.000	44%	100.000.000	52%	120.000.000	66%	120.000.000	76%	120.000.000	76%	660.000.000
		3	3 1	3	2 0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0	0	1 Dokum en	200.000.000	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	120.000.000	1 Dokum en	120.000.000	1 Dokum en	120.000.000	5 Dokum en	660.000.000
		3	3 1	3	2 0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan	0	0	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	50.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	5 Dokum en	330.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

						Terintegrasi secara Elektronik	Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS															
		3	31	3	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	330.000.000
		3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	270.000.000	5 Dokumen	1.420.000.000
		3	31	4	201		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	270.000.000	3 Dokumen	260.000.000	3 Dokumen	270.000.000	3 Dokumen	270.000.000	15 Dokumen	1.420.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	3 1	4	2 0 1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	0	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	50.000.000	1 Dokum en	50.000.000	1 Dokum en	50.000.000	1 Dokum en	50.000.000	5 Dokum en	300.000.000
		3	3 1	4	2 0 1	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	0	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	5 Dokum en	340.000.000
		3	3 1	4	2 0 1	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0	0	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	160.000.000	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	160.000.000	1 Dokum en	160.000.000	5 Dokum en	780.000.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,90	3,01		3,50		3,51		3,55		4,00		4,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin							Nilai Akip	72,16	72,72	73,00	4.522.900.000	73,00	4.490.950.000	73,00	4.529.705.000	73,00	4.599.810.000	73,00	4.932.955.000	73,00	23.076.320.000
		2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00	75,00	75,00	4.522.900.000	75,00	4.490.950.000	75,00	4.529.705.000	75,00	4.599.810.000	75,00	4.932.955.000	75,00	23.076.320.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen / 2 Laporan	4 Dokumen / 2 Laporan	2 Dokumen / 5 Laporan	130.000.000	2 Dokumen / 5 Laporan	100.000.000		131.500.000	2 Dokumen / 5 Laporan	131.500.000	2 Dokumen / 5 Laporan	131.500.000	10 Dokumen / 25 Laporan	624.500.000
2	7	1	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen - Renja - Renja RB	51.500.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	41.500.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	52.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	52.000.000	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	52.000.000	11 Dokumen	249.000.000
2	7	1	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	51.500.000	3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	31.500.000	3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	51.500.000	3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	51.500.000	3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	51.500.000	15 Laporan	237.500.000
2	7	1	2	0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	27.000.000	2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	27.000.000	2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	28.000.000	2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	28.000.000	2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	28.000.000	10 Laporan	138.000.000
2	7	1	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	1 Dok / 1 Lap	1 Dok / 1 Lap	1 Dok / 1 Lap	3.547.000.000	3 Dok / 3 Lap	3.568.000.000	3 Dok / 3 Lap	3.570.000.000	3 Dok / 3 Lap	3.570.000.000	3 Dok / 3 Lap	3.570.000.000	13 Dokumen / 13 Laporan	17.825.000.000
2	7	1	2	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	300	300 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	3.507.000.000	312 orang bulan (26 orang x 14 bulan)	3.443.000.000	324 orang bulan (27 orang x 14 bulan)	3.445.000.000	336 orang bulan (28 orang x 14 bulan)	3.445.000.000	336 orang bulan (28 orang x 14 bulan)	3.445.000.000	1608 Org/Bln	17.285.000.000
2	7	1	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	140.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
2	7	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
2	7	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	-	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	60.000.000
5	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	0	0	2 Laporan (- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulan)	20.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	10 Laporan	120.000.000
5	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	60.000.000
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	14 Laporan	75.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

5	1	1	2 0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lapora n	2 Lapora n	2 Lapora n (- Lap Rekonsi lasi - Lap Asset OPD)	15.000.000	2 Lapora n (- Lap Rekonsi lasi - Lap Asset OPD)	15.000.000	2 Lapora n (- Lap Rekonsi lasi - Lap Asset OPD)	15.000.000	2 Lapora n (- Lap Rekonsi lasi - Lap Asset OPD)	15.000.000	2 Lapora n (- Lap Rekonsi lasi - Lap Asset OPD)	10 Lapora n	75.000.000	
2	7	1	# #		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	3 Lapora n	60.000.000	2 Lapora n	65.000.000	2 Lapora n	45.000.000	3 Lapora n	75.000.000	2 Lapora n	22.500.000	12 Lapora n	267.500.000
2	7	1	2 0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	-	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	8 Unit	20.000.000
2	7	1	2 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	20.000.000	0	-	1 Paket	25.000.000	0	-	3 Paket	75.000.000
2	7	1	2 0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	2.500.000	5 Dokum en	72.500.000
2	7	1	2 0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	-	1 Dokum en	5.000.000	1 Dokum en	5.000.000	1 Dokum en	5.000.000	1 Dokum en	5.000.000	4 Dokum en	20.000.000
2	7	1	2 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	3 Orang	15.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	15.000.000	15 Orang	90.000.000
2	7	1	# #		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Lapora n	8 Lapora n	8 Lapora n	118.050.000	8 Lapora n	132.150.000	8 Lapora n	132.400.000	8 Lapora n	132.500.000	8 Lapora n	132.500.000	56 Lapora n	647.600.000
2	7	1	2 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.600.000	1 Paket	2.600.000	1 Paket	2.600.000	5 Paket	12.600.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	1	2 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.000.000	1 Paket	14.000.000	1 Paket	14.000.000	1 Paket	14.000.000	1 Paket	14.000.000	5 Paket	69.000.000
2	7	1	2 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	5 Paket	34.000.000
2	7	1	2 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.300.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.600.000	1 Paket	7.600.000	1 Paket	7.600.000	5 Paket	37.600.000
2	7	1	2 0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.650.000	1 Paket	7.750.000	1 Paket	7.800.000	1 Paket	7.800.000	1 Paket	7.800.000	5 Paket	38.800.000
2	7	1	2 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.400.000	1 Dokumen	15.400.000	1 Dokumen	15.500.000	1 Dokumen	15.500.000	5 Dokumen	77.100.000
2	7	1	2 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	42.500.000	15 Laporan	44.000.000	15 Laporan	44.000.000	15 Laporan	44.000.000	15 Laporan	44.000.000	75 Laporan	218.500.000
2	7	1	2 0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	34.000.000	5 Dokumen	160.000.000
2	7	1	# #		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0	2 Laporan	55.000.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	35.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	306.700.000	28 Laporan	466.700.000
2	7	1	2 0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	206.700.000	1 Unit	206.700.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	1	2 0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	-	1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	3 Unit	10.000.000
2	7	1	2 0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	5 Unit	25.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	6.000.000	2 Unit	9.000.000	4 Unit	20.000.000	15 Unit	63.000.000
2	7	1	2 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	4 Unit	30.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	5.000.000	3 Unit	15.000.000	4 Unit	30.000.000	13 Unit	83.000.000
2	7	1	2 0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	0	-	2 Unit	6.000.000
2	7	1	2 0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	0	-	2 Unit	6.000.000
2	7	1	2 0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	0	-	2 Unit	6.000.000
2	7	1	2 0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	30.000.000	4 Unit	52.000.000
2	7	1	2 0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	1 Unit	3.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	20.000.000	4 Unit	34.000.000
2	7	1	# #		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	540.750.000	4 Laporan	543.000.000	4 Laporan	543.000.000	4 Laporan	568.000.000	4 Laporan	588.000.000	26 Laporan	2.782.750.000
2	7	1	2 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	10 Laporan	7.300.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lapora n	3 Lapora n	3 Lapora n	18.000.000	3 Lapora n	18.500.000	3 Lapora n	18.500.000	3 Lapora n	18.500.000	3 Lapora n	18.500.000	15 Lapora n	92.000.000
2	7	1	2 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lapora n	2 Lapora n	2 Lapora n	10.000.000	2 Lapora n	11.000.000	2 Lapora n	11.000.000	2 Lapora n	11.000.000	2 Lapora n	11.000.000	10 Lapora n	54.000.000
2	7	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lapora n	3 Lapora n	3 Lapora n	511.450.000	3 Lapora n	512.000.000	3 Lapora n	512.000.000	3 Lapora n	537.000.000	3 Lapora n	557.000.000	15 Lapora n	2.629.450.000
2	7	1	# #	#	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lapora n	3 Lapora n	3 Lapora n	57.100.000	8 Lapora n	47.800.000	8 Lapora n	57.805.000	8 Lapora n	57.810.000	8 Lapora n	166.755.000	35 Lapora n	387.270.000
2	7	1	2 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	40.100.000	2 Unit	13.800.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.005.000	2 Unit	56.755.000	2 Unit	140.660.000
2	7	1	2 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	12.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	8.305.000	2 Unit	8.305.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	63.610.000
2	7	1	2 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	6.000.000	10 Unit	6.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	42.000.000
2	7	1	2 0 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	1 Unit	4.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	24.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	1	2	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipeliharaa	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	27.000.000
2	7	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	37.000.000
2	7	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	27.000.000
2	7	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	26.000.000
TOTAL										12.700.000.000		13.360.500.000		13.430.907.000		13.460.000.000		13.425.000.000		66.376.407.000

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berikut ini adalah rumusan penjabaran indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun di tampilkan dalam tabel sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perindustrian											
1.	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk [dibagi] jumlah IKM [dikali] 100 persen	Persen	0,65	0,65	0,66	,066	,066	0,67	0,67	0,67
Ketenagakerjaan											
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Penduduk Bekerja [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100 persen	Persen	59,76	60,17	61,21	62,45	63,71	64,17	65,27	65,27
3.	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Lokal [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja [dikali] 100 persen	Persen	91,37	91,37	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65	91,65
4.	Nilai Akip	Nilai	Nilai	72,16	72,72	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
A	TENAGA KERJA										
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada perusahaan [dibagi] jumlah tenaga kerja PMDN dan PMA [dikali] 100 persen	Persen	91,63	92,25	93,31	94,55	95,41	96,33	97,56	97,56



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi [dibagi] jumlah tenaga kerja keseluruhan [dikali] 100 persen	Persen	55,79	55,79	56,45	56,45	57,23	57,23	58,00	58,00
3	Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi	Memfasilitasikan penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama oleh mediator Hubungan industrial	Kasus	5	5	5	5	6	6	6	38
4	Retribusi IMTA	Retribusi Perpanjangan IMTA	M (Rp)	1,6	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	14,2
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Jumlah pencaker/pencari kerja yang ditempatkan [dibagi] jumlah pencaker yang mendaftar [dikali] 100 persen	Persen	44,66	44,66	45,15	46,50	46,15	47,25	47,25	47,25
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai	N/A	80	80	80	80	80	80	80
II	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
E	PERINDUSTRIAN										
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n [dibagi] jumlah kelompok pengrajin [dikali] 100 persen	Persen	48,15	59,65	69,65	77,15	82,15	85,40	88,90	88,90
2	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan [dibagi] jumlah izin yang dikeluarkan [dikali] 100 persen	Persen	12	16,6	26,6	44	52	66	76	76
3	Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam jangka 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2021. Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 dan tugas dan fungsi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berperan dalam mendukung dan mensukseskan capaian misi Ke-Satu, Ke-Tiga dan Ke-Lima Kabupaten Karimun yaitu:

Misi Ke-Tiga : *Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)*

Misi Ke-Lima : *Mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)*

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.



- 2) Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Dan membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
- 3) Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan mitra serta stakeholder Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

LAMPIRAN

1. *HASIL MAPPING PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2021*
2. *POHON KINERJA & CASCADING MISI 3*
3. *POHON KINERJA & CASCADING MISI 5*

HASIL MAPPING PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2021
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR. 050.3708 TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

				KELENGKAPAN DATA PENGINPUTAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KE APLIKASI SIPD BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020													
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN / KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET TH 2021		UNIT KERJA OPD PENANGG UNGJAW AB	LOKASI	WAKTU PELAKSAN AAN	KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN YANG LAMA	
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KINERJA	PAGU ANGGARAN					
				5													
				5	0 1							17.680.000.000					
Meningka tkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatn ya Akuntabilita s kinerja Disnakerind	Nilai AKIP Disnakerind	5	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75		Sekretariat				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				5	0 1	0 1	20 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%						
				5	0 1	0 1	20 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	75.000.000		Kab. Karimun	Jan- Juni	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	
				5	0 1	0 1	20 1	0 1	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	2	90.000.000		Kab.	Jan-Des	Program Peningkatan	

					1	1	1	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	yang disusun	dokumen			Karimun		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD
				5	0 1	0 1	20 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				5	0 1	0 1	20 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.850.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5	0 1	0 1	20 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				5	0 1	0 1	20 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian	53 stel	60.000.000		Kab. Karimun	Mar-Mei	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
				5	0 1	0 1	20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				5	0 1	0 1	20 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor dalam satu tahun	5 jenis			Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				5	0 1	0 1	20 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	28.522.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Alat Tulis Kantor

			5	0 1	0 1	20 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT	7 Peralatan	6.240.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			5	0 1	0 1	20 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	3 Jenis	15.244.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Makanan dan Minuman
			5	0 1	0 1	20 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan yang dicetak dan digandakan	10 Laporan	12.833.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5	0 1	0 1	20 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bhn Bacaan	17 Jenis	24.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			5	0 1	0 1	20 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat	50 kali	157.900.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			5	0 1	0 1	20 6	0 9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi WEB	1 Web	70.000.000	-	Kab. Karimun	Jan-Des	Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Operasional WEB Ketenagakerjaan dan Peindustrian
			5	0 1	0 1	20 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			5	0 1	0 1	20 7	0 5		Jumlah pengadaan mebel	5 unit	150.000.000		Kab. Karimun	Jan-Juni	Pengadaan Mebeleur
			5	0 1	0 1	20 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			5	0 1	0 1	20 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	10.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

				5	0	0	20	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	17.880.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				5	0	0	20	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	826.904.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				5	0	0	20		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara secara rutin/berkala	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				5	0	0	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	52.477.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
				5	0	0	20	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	30.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
				5	0	0	20	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi	1 unit	18.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
				2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

				2	0	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
Mendoro ng perluasan dan kesempat an kerja bagi tenaga kerja didaerah	Tingkat Penganggur an Terbuka (PTP)	Meningkatn ya pertumbuha n tenaga kerja lokal yang kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2	0	7	0	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	92.25%		Subbagian Perencana an dan Keuangan			Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
			2. Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	2	0	7	0	2	20	1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%						
				2	0	7	0	2	20	1	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah laporan analisis	1 dokumen	120.000.000		Kab. Karimun	Jan-Mar	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja Daerah (Makro)
				2	0	7	0	2	20	1	0	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah laporan koordinasi	1 dokumen	-		Kab. Karimun		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja Daerah (Mikro)
				2	0	7	0	3					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	55.79%		Bidang Pelatihan dan Produktivi tas Tenaga Kerja			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			2	0	7	0	3	20	1			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Sesuai Kompetensi	100%						
			2	0	7	0	3	20	1	0	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta	439 Orang	8.000.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Pelatihan Las Dasar	
																			Pelatihan dan Sertifikasi Las Lanjutan	
																			Pelatihan dan Sertifikasi Listrik	
																			Pelatihan dan Sertifikasi Scaffolding	
									Pelatihan dan Sertifikasi Gada Pratama											

															Pelatihan dan Sertifikasi Mekanik (Pesawat Angkat dan Angkut)
															Pelatihan Ahli K3 Umum
															Pelatihan dan Sertifikasi Gada Madya
															Pelatihan dan Sertifikasi K3 Kebakaran
															Pelatihan Bekerja di Ketinggian
															Pelatihan dan Sertifikasi Rigger
															Pelatihan dan Sertifikasi Fitter
															Pendampingan Pengiriman Peserta Ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
															Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut
															Inventarisasi Kebutuhan Pelatihan Di Desa, Kelurahan Dan Perusahaan
				2	07	03	202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Pembinaan LPK	100%				
				2	07	03	202	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang Dibina	4 LPK	50.000.000		Kab. Karimun	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Perusahaan Jasa Keselaman dan Kesehatan Kerja (PJK3) di Wlayah Kab Karimun
				2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	44.66%		Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja		Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja
										Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	2 (m) Rupiah				

				2	0	0	20		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kreja	1 Dokumen					
				2	0	0	20	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah orang yang diperdayakan	20 Orang	150.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Sosialisasi Rekrutmen Antar Kerja Lokal (AKL) Dan antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Di Kabupaten Karimun
				2	0	0	20		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin LPTKS	1 dokumen					
				2	0	0	20	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS	2 LPTKS	280.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Teknologi Tepat Guna (TTG)
																Tenaga Kerja Mandiri
				2	0	0	20		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	9 Perusahaan					
				2	0	0	20	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan	1 Laporan	100.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Operasional Informasi Pasar Kerja
				2	0	0	20		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	137 Orang					
				2	0	0	20	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 Laporan	80.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Pelaporan dan Sinkronisasi Data Tenaga Kerja Indonesia Dan Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kabupaten Karimun

				2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus Yang di Fasilitas	5 Kasus		Bidang Hubungan Industrial			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
				2	0	0	20		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	18 Perusahaan	75.000.000				
					7	5	1			Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	4 Perusahaan	485.000.000				
				2	0	0	20	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Laporan Pengesahan PP	1 Laporan	75.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan
					7	5	1	1								Bimtek Tata Cara Perundingan PKB
				2	0	0	20	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Laporan PKB	1 Laporan	125.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Bimtek Tata Cara Perundingan Bipartit
				2	0	0	20	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Pendataan HI	1 Laporan	360.000.000		Kab. Karimun	Jan-Des	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Syarat dan Norma Kerja
					7	5	1	3								Bimtek Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain
																Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun
																Bimtek Struktur dan Skala Upah

				2	0	0	20		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan						
				2	0	0	20	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang tutup	10 Perusahaan	75.000.000		Kab. Karimun	Jan - Des	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
				2	0	0	20	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang berselisih	3 Perusahaan	65.000.000		Kab. Karimun	Jan - Des	Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
				2	0	0	20	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,	Jumlah Laporan Verifikasi SP/SB	1 Laporan	100.000.000		Kab. Karimun	Jan - Des	Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

									Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
				2	0 7	0 5	20 2	0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	6 LKS Tripartit	125.000.000			Jan - Des	Pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit
				2	0 7	0 5	20 2	0 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang mendapat pengembangan Jamsostek		50.000.000			Jan - Des	Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
				3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
				3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
Meningka tnya Pendapat an Masyarak at	PDRB Perkapita	Meningkatn ya Kewirusaha n Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	92.25%		Bidang Industri			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
				3	3 1	0 2	20 1		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	.335.000.000		Kab. Karimun		
				3	3 1	0 2	20 1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah IKM yang diberdayakan	20 IKM	1.335.000.000		Kab. Karimun	Jan - Des	Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Baku Lokal

									Industri dan Peran Serta Masyarakat								Pelatihan Cefe
																	Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah
																	Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
																	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Calon Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
				3	3 1	0 2	20 1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000		Kab. Karimun	Jan - Des		Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah

Tg. Balai Karimun, Oktober 2020

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

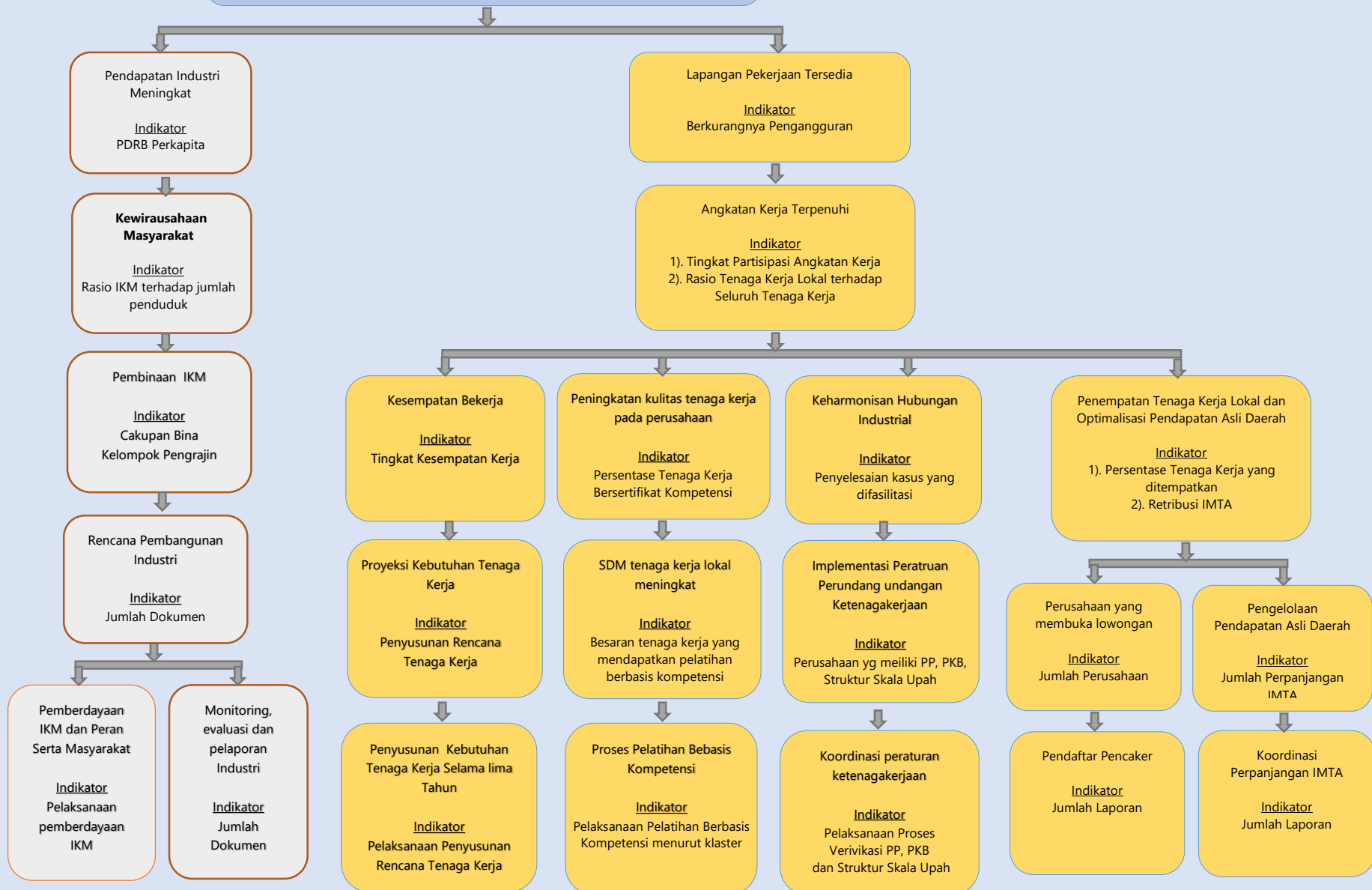


Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010

POHON KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2021-2026
KABUPATEN KARIMUN

MISI 3

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)



**CASCADING
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2021 - 2026
KABUPATEN KARIMUN**

VISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

MISI 3
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)

TUJUAN I
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Indikator
PDRB Perkapita

SASARAN:
Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat

Indikator
Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk

SASARAN:
Meningkatnya Kelompok mandiri binaan

Indikator
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

SASARAN:
Meningkatnya Penegendalian Industri Kecil dan Menengah

Indikator
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

SASARAN:
Tersedianya Media Informasi industri yang akurat

Indikator
Informasi Industri secara lengkap dan terkini

SASARAN:
Tersedianya Rencana Pembangunan Industri

Indikator
Jumlah Dokumen

SASARAN:
Meningkatnya Penegendalian Industri Kecil dan Menengah

Indikator
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

SASARAN:
Optimalisasi Informasi Industri

Indikator
Jumlah Laporan Informasi industri

SASARAN:
Terlaksananya Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator
Jumlah peserta pemberdayaan IKM yang dilaksanakan dalam 1 tahun

SASARAN:
Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)

Indikator
Jumlah Laporan

SASARAN:
Terlaksananya Pendataan Industri

Indikator
Laporan Informasi industri selama 1 Tahun

TUJUAN II
Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah

Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN:
Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif

Indikator
1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2). Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja

SASARAN:
Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator
Tingkat Kesempatan Kerja

SASARAN:
Tersedianya Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Makro

Indikator
Jumlah Dokumen

SASARAN:
Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro

Indikator
Jumlah Dokumen

SASARAN:
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Indikator
Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek

SASARAN:
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Indikator
Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimtek

SASARAN:
Meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi

Indikator
Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

SASARAN:
Terlaksananya Pelatihan Berbasis kompetensi melalui Penda

Indikator
Jumlah Peserta pelatihan kompetensi dalam 1 tahun

SASARAN:
Meningkatnya Produktifitas pada Perusahaan

Indikator
Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas

SASARAN:
Terlaksananya Pengukuran Produktifitas Pada Perusahaan

Indikator
Jumlah Laporan

SASARAN:
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis

Indikator
1). Penyelesaian kasus yang difasilitasi

SASARAN:
Mewujudkan Norma Ketenagakerjaan

Indikator
1). Jumlah Perusahaan yang memiliki PP
2). Jumlah Perusahaan yang memiliki PKB
3). Jumlah Perusahaan yang memiliki Struktur Sekala Upah

SASARAN:
Terlaksananya Verifikasi PP dan PKB

Indikator
Jumlah Laporan Verifikasi

SASARAN:
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Indikator
Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar Kependudukan BPJS Ketenagakerjaan

SASARAN:
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

Indikator
Jumlah Perusahaan

SASARAN:
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Lokal serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Indikator
1). Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan
2). Retribusi IMTA

SASARAN:
Tersedianya Kesempatan Kerja

Indikator
Jumlah Perusahaan yang mempublikasikan Kesempatan Kerja

SASARAN:
Terselenggaranya Pendaftaran Pencari Kerja

Indikator
Jumlah Laporan Pencaker dalam 1 Tahun

SASARAN:
Terwujudnya Pelayanan IMTA

Indikator
Jumlah Perpanjangan IMTA

SASARAN:
Terselenggaranya Pelayanan IMTA

Indikator
Jumlah Laporan Pelayanan IMTA dalam 1 Tahun

Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
Indikator
Indek Reformasi Birokrasi

Kualitas Pelayanan Publik
Indikator
Indeks Pelayanan Publik

Akuntabilitas meningkat

Kualitas Pelayanan OPD
Indikator
1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2). Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Perencanaan berkualitas
Indikator
Nilai Evaluasi Dokumen

Evaluasi Kinerja OPD
Indikator
Persentase IKM OPD

Kinerja Keuangan Meningkat
Indikator
1). Persentase tercapainya

Perencanaan Selaras
Indikator

1). Persentase keselarasan penganggaran dengan perencanaan

Tersedia Data/Informasi
Indikator

1). Jumlah data yang dikelola
2). Jumlah dokumen perencanaan yang di publish

Perencanaan terimplementasi
Indikator

1). Persentase capaian program OPD
2). Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD

Laporan Kinerja
Indikator

Jumlah laporan kinerja yang disusun

Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD
Indikator

1). Jumlah laporan hasil evaluasi Renja
2). Jumlah laporan hasil Reviu Renstra

Monitoring kinerja
Indikator

Jumlah laporan hasil monitoring kinerja

Pengelolaan Keuangan OPD
Indikator

1). Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi $\geq 95\%$
2). Persentase serapan anggaran OPD

SDM OPD berkualitas
Indikator

1). Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
2). Persentase pegawai dengan nilai SKP ≥ 85
3). Persentase pegawai dengan rata-rata capaian kinerja (PK) $\geq 85\%$

Sarana prasarana kerja memadai
Indikator

1). Persentase Asset OPD dalam kondisi baik
2). Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi
3). Persentase realisasi anggaran pengadaan asset

Implementasi SOP
Indikator

1). Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
2). Persentase penurunan jumlah pengaduan

Pengelolaan Administrasi perkantoran
Indikator

1). Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
2). Persentase dokumen yang diarsip sesuai aturan

Koordinasi Perencanaan OPD
Indikator

1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD
Indikator

1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Pengeoperasian TEPR
Indikator

1). Ketepatan waktu pelaporan TEPR
2). Jumlah kegiatan yang terlaksana

Pelaporan keuangan
Indikator

Jumlah laporan keuangan yang disusun

Pengelolaan pencairan anggaran
Indikator

1). Jumlah SPJ yang dikelola
2). Jumlah SPP yang terbit
3). Jumlah SPM yang terbit

Disiplin pegawai meningkat
Indikator

Jumlah laporan kehadiran pegawai

Kinerja pegawai meningkat
Indikator

1). Jumlah PNS yang menyusun PK
2). Rata-rata Pegawai yang melaporkan SKP tepat waktu
3). Jumlah pegawai yang naik pangkat
4). Jumlah pegawai yang naik gaji berkala

Pengembangan SDM
Indikator

1). Persentase pegawai yang mengikuti Bimtel
2). Persentase Rencana kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi

Pengadaan Asset
Indikator

Jumlah Asset yang dibeli

Pengelolaan Asset
Indikator

1). Jumlah penghapusan asset
2). Jumlah Asset yang di service

Penyusunan SOP
Indikator

Jumlah SOP yang disusun

Evaluasi SOP
Indikator

Jumlah SOP yang direvisi

Pengelolaan Arsip
Indikator

1). Jumlah arsip statis yang dikelola
2). Jumlah arsip dinamis yang dikelola

Pengelolaan Surat menyurat
Indikator

1). Jumlah Surat masuk yang dikelola
2). Jumlah surat keluar yang dikelola
3). Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti

Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
Indikator
Indek Reformasi Birokrasi

Kualitas Pelayanan Publik
Indikator
Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin
Indikator
Nililai AKIP Disnakerin

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Disnakerin
Indikator
Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan Disnakerin

Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan
Indikator
1). Persentase keselarasan penganggaran dengan perencanaan
2). Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
3). Persentase capaian program
4). Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD



Meningkatnya Capaian Kinerja Disnakerin
Indikator
Persentase IKU yang mencapai target Disnakerin

Meningkatnya Pengendalian Evaluasi Kinerja
Indikator
1). Persentase sub/kegiatan rata-rata capaian kinerja > 90 %
2). Persentase Pejabat dengan rata-rata capaian kinerja (PK) ≥ 85 %
3). Persentase Laporan Kinerja yang disusun tepat waktu



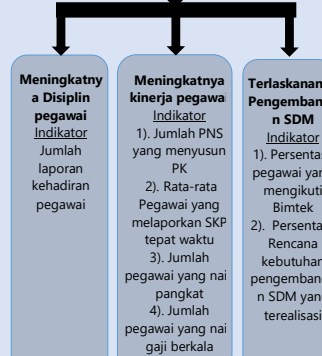
Meningkatnya Kinerja Keuangan Disnakerin
Indikator
1). Persentase temuan LHP yang ditindaklanjuti
2). Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
Indikator
1). Persentase serapan anggaran OPD
2). Persentase SPJ yang terverifikasi lengkap
3). Persentase Laporan Penerimaan IMTA tepat waktu
3). Persentase Realisasi Fisik



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Disnakerin
Indikator
1). Indeks Kepuasan Masyarakat
1). Indeks Profesionalitas

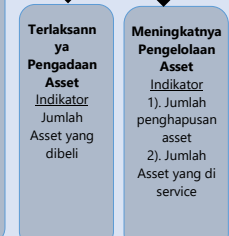
Meningkatnya Kualitas SDM
Indikator
1). Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
2). Persentase pegawai dengan nilai SKP ≥ 85



Meningkatnya Pengelolaan Administrasi perkantoran
Indikator
1). Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
2). Persentase dokumen yang diarsip sesuai aturan



Tersedianya Sarana prasarana kerja yang memadai
Indikator
1). Persentase Asset OPD dalam kondisi baik
2). Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi
3). Persentase realisasi anggaran pengadaan asset



Tersedianya Aplikasi Ketenagakerjaan
Indikator
Jumlah Aplikasi Yang dibangun

